

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang semakin pesat di era saat ini menyediakan berbagai akses bagi masyarakat global untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan individu maupun kelompok yang semakin kompleks. Hal tersebut didukung oleh teknologi industri, termasuk manufaktur, yang semakin mutakhir. Situasi tersebut menandakan kemajuan peradaban global yang memberikan banyak dampak positif bagi kehidupan manusia, seperti diproduksinya gawai dan peralatan elektronik yang semakin canggih yang memudahkan pekerjaan manusia, dan lain sebagainya. Di sisi lain, peradaban dunia yang semakin modern juga memberikan tantangan untuk menjaga dan mengelola eksistensi sumber daya alam yang tersedia, yang rentan mengalami degradasi karena aktivitas ekstraksi dan pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak memperhatikan ketahanan lingkungan hidup.

Dewasa ini, ketahanan lingkungan hidup menjadi salah satu isu yang mendapatkan sorotan dari masyarakat di berbagai belahan dunia, yang disebabkan karena kondisi kerusakan lingkungan yang semakin parah karena berbagai aktivitas manusia. Isu ketahanan lingkungan hidup tidak hanya terbatas pada cakupan regional maupun nasional, namun telah menjadi perhatian global karena dampak yang ditimbulkan atas permasalahan lingkungan mencakup wilayah yang sangat luas dan terjadi di berbagai belahan dunia. Peningkatan gas rumah kaca seperti karbondioksida (CO₂) dan metana (CH₄) di atmosfer yang umumnya disebabkan karena transportasi dan pemenuhan energi, yang menyebabkan efek gas rumah kaca dan pemanasan global (*global warming*) menjadi salah satu isu sentral yang memberikan dampak bagi ketahanan lingkungan global.

Brown dan Sovacool di dalam studinya menyatakan bahwa ketahanan energi merupakan unsur yang paling penting dari keamanan umat manusia (Sovacool &

Brown, 2010, 79). Pemanfaatan energi sangat mempengaruhi berbagai aktivitas manusia di manapun, yang digunakan sebagai bahan bakar transportasi, sumber energi di tempat kerja, pengolahan makanan, manufaktur, distribusi produk, dan lain sebagainya. Hal tersebut didukung oleh argumen Schumacher yang menyatakan bahwa energi bukan hanya sebagai sebuah komoditas, namun sebagai prasyarat dari adanya seluruh komoditas, yang keberadaannya setara dengan kebutuhan dasar seperti air, udara, dan tanah (Sovacool & Brown, 2010, 79). Selain itu perbandingan internasional atas isu ketahanan energi juga menunjukkan saling ketergantungan, yang terjalin dalam hubungan antara produsen dan konsumen. Tidak ada satupun negara di dunia yang benar-benar mandiri dalam sektor energi (Sovacool & Brown, 2010, 80).

Studi yang dilakukan oleh Asian Development Bank menunjukkan bahwa sejumlah 66.5% emisi karbondioksida dunia disebabkan oleh transportasi dan pemenuhan energi, di mana perubahan iklim dianggap sebagai ancaman ganda dalam hal ketahanan energi (Sovacool, 2014, 1). Perubahan iklim merupakan perhatian utama di dalam pemenuhan kebutuhan energi yang tidak hanya disebabkan karena bencana alam, kerusakan pembangkit listrik, mengganggu pengiriman impor bahan bakar, namun lebih-lebih karena perubahan iklim memberikan dampak pada ketahanan pangan, kesehatan, dan lingkungan yang dapat menurunkan pendapatan dasar dari negara-negara di Asia dan menambah utang pemerintah, serta memperumit upaya pembuatan kebijakan terkait energi (Sovacool, 2014, 3).

Pemanfaatan bahan bakar fosil sebagai penyokong pasokan energi baik di negara maju maupun negara berkembang menyebabkan banyak permasalahan yang tidak terbatas pada problem lingkungan, namun juga kesehatan. Selain itu, sebagai entitas yang memegang peranan kunci terhadap sistem produksi energi, bahan bakar fosil juga tidak terdistribusikan secara merata kepada masyarakat, terlebih karena sifatnya yang tidak dapat diperbarui dan tidak memberikan jaminan atas sistem pembangunan berkelanjutan. Oleh karena keterbatasan yang dimiliki oleh bahan bakar fosil, dunia juga dihadapkan pada krisis energi. Meskipun demikian, sampai saat ini

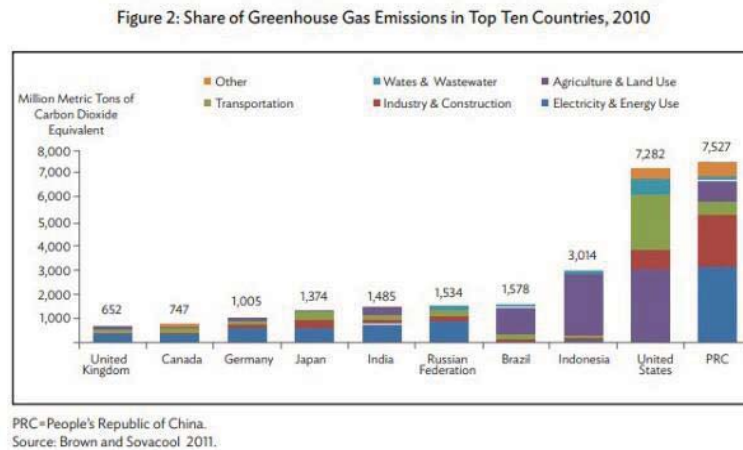
masih banyak ditemui praktik-praktik pemanfaatan energi yang tidak bijak oleh masyarakat, yang semakin memperparah krisis energi di berbagai belahan dunia.

Proses pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan banyak zat berbahaya seperti karbon dioksida dan sulfur dioksida, yang menyebabkan peningkatan temperatur dan pemanasan global, serta gangguan pernapasan khususnya bagi masyarakat yang bertempat tinggal di area sekitar pembangkit listrik. Sebagai alternatif atas problem krisis energi yang dihasilkan oleh bahan bakar fosil, saat ini telah dikembangkan dan diterapkan pemanfaatan energi terbarukan di beberapa negara. Pada umumnya negara-negara maju di Eropa telah memformulasikan kebijakan dan proyeksi ke arah energi terbarukan. Sweden merupakan salah satu negara yang telah berhasil menjadi negara nomor satu penggunaan energi baru dan terbarukan, dengan penetapan target, “untuk mengeliminasi penggunaan bahan bakar fosil dari pembangkit listrik pada 2040”.

Konsumsi energi dan listrik yang pada saat ini masih tergantung pada batu bara, khususnya di Indonesia, menjadi salah satu sumber utama penyebab polusi udara di berbagai wilayah, mulai dari kota-kota besar hingga ke pelosok daerah. Kendati telah ditetapkan target untuk mencapai 23% penggunaan energi baru dan terbarukan pada tahun 2025 dan 31% penggunaan EBT (energi baru dan terbarukan) pada 2050, namun diperlukan komitmen kuat dari pemerintah untuk mencapai akselerasi penggunaan energi terbarukan di Indonesia.

Studi yang dilakukan oleh Brown dan Sovacool (2011) menunjukkan 10 negara teratas di dunia yang menyumbangkan emisi gas rumah kaca yang paling besar, di mana Indonesia berada pada urutan ketiga. Sumber utama penghasil emisi gas rumah kaca di Indonesia berada pada sektor agrikultur dan pemanfaatan lahan, ditambah dengan sumber-sumber lainnya seperti penggunaan energi dan listrik, transportasi, konstruksi dan industri, dan lain sebagainya, dengan total emisi setara dengan 3014 juta metrik ton karbondioksida.

Gambar 1.1 Grafik Emisi Gas Rumah Kaca pada 10 besar negara penghasil emisi di dunia 2010

(Sumber: [Sovacool, 2014, 3.](#))

Apabila kondisi tersebut terus dibiarkan, maka negara-negara di Asia seperti Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Filipina akan terancam mengalami kehilangan gabungan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 6.7% pada tahun 2100, jika terdapat perubahan temperatur sebagaimana yang telah diprediksi oleh panel diskusi antar pemerintah (*Conference of the Parties/COP*) yang mana lebih dari dua kali lipat rata-rata kerugian global (Sovacool, 2014, 3). Hal tersebut juga dipengaruhi oleh situasi negara-negara di Asia yang memiliki keadaan geografis yang unik, pendapatan per kapita yang relatif rendah, dan pola urbanisasi yang cenderung berubah-ubah.

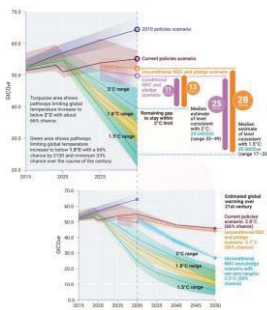
Demi menunjukkan komitmen untuk mengatasi permasalahan lingkungan terkait perubahan iklim, *Conference of the Parties 21* (COP21) pada 2015 menyepakati sebuah perjanjian global yang disebut dengan *Paris Agreement*, yang memiliki tujuan utama untuk menjaga kenaikan temperatur global di bawah 2 derajat celcius di atas tingkat pra-industri dan mengejar upaya untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1.5 derajat celcius. Untuk mengupayakan hal tersebut dan mengetahui perkembangan dari komitmen global terhadap *Paris Agreement*, maka setiap pihak diharuskan untuk

memberikan sebuah laporan reguler tiap 5 tahun sekali yang dituangkan di dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC).

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk merefleksikan pencapaian dan target pengurangan emisi pada satu dekade mendatang (2030), maka setiap pihak yang telah meratifikasi *Paris Agreement* diharuskan untuk mengkomunikasikan *Nationally Determined Contribution* (NDC) pada 2020 lalu, yang dilanjutkan dengan agenda *Conference of the Parties 26* (COP26) pada Oktober-November 2021. Berdasarkan data yang diperoleh dari *Emission Gap Report 2021* yang diterbitkan oleh *United Nations Environment Programme* (UNEP), kebijakan dari negara-negara global yang saat ini ditetapkan pada *Nationally Determined Contribution* (NDC) masih belum cukup untuk mencapai target *Paris Agreement* pada 2030.

Dari studi tersebut, dapat diketahui bahwa pemanasan global akan mencapai angka 2.7 derajat celcius pada akhir abad jika seluruh perjanjian tak bersyarat (*unconditional pledges*) dapat diimplementasikan seluruhnya dan 2.6 derajat celcius jika seluruh perjanjian bersyarat (*conditional pledges*) juga diterapkan (UN Environmental Programme, *Emission Gap Report 2021*).¹ Berikut adalah grafik emisi gas rumah kaca global yang disajikan melalui beberapa skenario.

Gambar 1.2 Grafik emisi gas rumah kaca global 2015-2050



(Sumber: [United Nations Environmental Programme, 2021, 15](#))

¹ *Unconditional pledge* (perjanjian tak bersyarat) merupakan sebuah perjanjian yang mengandaikan kondisi di mana sebuah negara dapat berkontribusi sesuai dengan sumber daya dan kapabilitas yang dimilikinya sendiri. Sementara *conditional pledge* (perjanjian bersyarat) mengandaikan sebuah kondisi ketika suatu negara berkontribusi dengan sokongan dari dunia internasional, atau ketika terdapat syarat tertentu yang terpenuhi.

Grafik tersebut menunjukkan bahwa skenario kebijakan target pengurangan emisi pada tahun 2100 akan menghasilkan total emisi global sekitar 64 Gt CO₂e pada 2030. Sementara itu, kebijakan yang telah ditetapkan saat ini (*current policies*) akan menghasilkan sekitar 55 Gt CO₂e total emisi global pada 2030, yang apabila dibandingkan dengan target *Paris Agreement* untuk mengontrol kenaikan suhu global di bawah 2 derajat celcius yang setara dengan jumlah 39 Gt CO₂e pada 2030, maka masih terdapat emisi gap sekitar 16 Gt CO₂e. Untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1.5 derajat celcius yang setara dengan 25 Gt CO₂e jumlah emisi global pada 2030, maka terdapat emisi gap yang lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah emisi yang dihasilkan melalui penerapan kebijakan saat ini (*current policies*), yaitu sekitar 30 Gt CO₂e.

Berdasarkan studi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan global yang ada pada saat ini (*current policies*) masih tidak mencukupi untuk dapat memenuhi target *Paris Agreement* pada 2030. Hal tersebut menunjukkan bahwa komitmen global untuk mengurangi emisi tidak ditunjang oleh serangkaian aksi yang memiliki dampak signifikan terhadap urgensi perubahan iklim. Salah satu implikasi dari ketidaktercapaian target tersebut dibuktikan melalui data emisi gas rumah kaca yang semakin meningkat di atmosfer, kendati sebelumnya terdapat pengurangan emisi fosil karbon dioksida global sebesar 5.4% yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang belum pernah terjadi sebelumnya. Per hari ini, konsentrasi emisi karbon dioksida global terus meningkat sekitar 2.3 ppm (*parts per million*).

Berdasarkan data dari *Presidency Outcome The Climate Pact COP26* lalu, Indonesia termasuk ke dalam enam negara penghasil emisi terbesar di dunia, bersama dengan United States, Brazil, EU, Pakistan, dan Argentina, yang setara dengan 46% total emisi global dan lebih dari 70% PDB (Produk Domestik Bruto), sehingga Indonesia turut memainkan peran penting untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1.5 derajat celcius. Berbagai macam gerakan lingkungan yang terjadi sepanjang tahun merefleksikan kesadaran masyarakat baik di tingkat lokal maupun global bahwa ketahanan lingkungan merupakan prasyarat yang harus dipenuhi demi menciptakan

kehidupan yang layak dan berkelanjutan. Guna mengakomodasi kepentingan keberlanjutan lingkungan, terdapat berbagai macam saluran yang dipilih oleh gerakan sosial, yang terdiferensiasi ke dalam beberapa sektor tertentu, seperti gerakan sosial sektor perubahan iklim (*climate change social movement sector*), gerakan sosial sektor manajemen persampahan (*waste management social movement sector*), dan lain sebagainya.

Urgensi perubahan iklim yang terjadi di berbagai belahan dunia yang sekaligus menjadi permasalahan global menimbulkan atensi dari berbagai pihak, baik dari kalangan masyarakat akar rumput, pemerintah, swasta, dan berbagai NGO (*Non-Governmental Organization*) untuk melakukan aksi dan mencari solusi atas permasalahan tersebut. Munculnya diversifikasi gerakan lingkungan, khususnya terkait perubahan iklim menunjukkan adanya suatu visi sentral yang diyakini oleh setiap orang di berbagai belahan dunia dari kalangan manapun, bahwa isu perubahan iklim merupakan problem bersama yang akan menyasar aspek kehidupan seluruh makhluk hidup di bumi tanpa terkecuali, dan apabila tidak ditangani maka dampak kerugiannya akan dirasakan di seluruh belahan dunia. Almeida (2019) menyatakan bahwa gerakan iklim (*climate movement*) telah sejak lama menjadi gerakan sosial yang paling ekstensif dalam hal kapasitasnya untuk menghasilkan aksi global secara simultan (Moor et al., 2020, 7). Pada 2019, kampanye mengenai perubahan iklim mengalami peningkatan, yang salah satunya dibawakan oleh sebuah gerakan iklim yang memiliki dampak yang sangat luas di berbagai belahan dunia dengan tingkat mobilisasi yang tinggi, yaitu *Fridays for Future* (FFF).

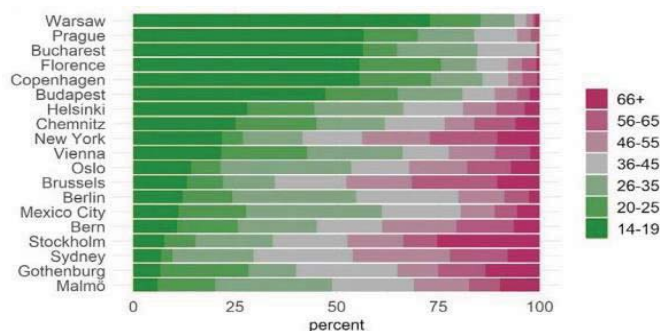
Gerakan tersebut didasari oleh “aksi mogok sekolah” oleh pelajar sekolah dasar sampai menengah di Swedia dan Eropa pada setiap hari Jumat, yang dimulai pada Agustus 2018. Aksi tersebut kemudian tersebar ke berbagai penjuru dunia, yang merefleksikan tuntutan bagi pemerintah terkait agar mengambil langkah yang lebih tegas terkait isu perubahan iklim. *Fridays for Future* (FFF) melakukan empat aksi besar di sepanjang tahun 2019, tepatnya pada 15 Maret, 24 Mei, 20-27 September, dan 29 November. Pada aksi yang berlangsung antara 20-27 September, aksi yang dipimpin

oleh aktivis iklim muda, Greta Thunberg, di New York, mampu memobilisasi sekitar 250.000 demonstran, yang diikuti oleh aksi damai di 185 negara yang menghasilkan lebih dari 6000 acara dan 7.6 juta partisipan (Moor et al., 2020, 7).

Berdasarkan laporan mengenai gerakan *Fridays for Future* (FFF) pada 20-27 September 2019 di 19 negara di berbagai benua (Amerika, Eropa, Australia, dan lain sebagainya) yang diterbitkan oleh *Swedish Research Council for Sustainable Development*, profil para demonstran didominasi oleh pelajar perempuan. Selain itu, terdapat diversifikasi latar belakang para demonstran, mulai dari tradisional demonstran hingga para individu melek politik yang konvensional. Laporan yang mencapai pangsa rata-rata sekitar 45% dari seluruh negara yang diteliti tersebut menunjukkan bahwa segmentasi demonstran yang memainkan peran substantif merupakan anak muda yang memiliki rentang usia 14/15 - 19 tahun, yang selanjutnya memperlihatkan bahwa terdapat peningkatan median usia pada bulan Maret - September 2019, di rentang usia 21-28 tahun.

Hal tersebut membuktikan bahwa gerakan sosial khususnya aksi mengenai perubahan iklim yang dipelopori oleh anak muda, meskipun berawal dari skala sempit ternyata mampu memobilisasi dukungan yang besar yang menembus batas-batas geografis di seluruh belahan dunia. Berikut merupakan segmentasi usia demonstran yang terlibat dalam gerakan *Fridays for Future* (FFF) pada bulan September 2019 di berbagai kota di seluruh dunia.

Gambar 1.3 Grafik segmentasi usia demonstran *Fridays for Future* (FFF) 2019



(Sumber: Moor et al., 2020, 12)

Grafik tersebut menunjukkan bahwa kaum muda mengambil peran yang signifikan di dalam keberlangsungan gerakan lingkungan yang bertujuan untuk menciptakan perubahan pada status quo dan merefleksikan bahwa isu ketahanan lingkungan dan iklim merupakan suatu gagasan universal yang diyakini di berbagai tempat dalam rentang usia manapun. Selain itu terdapat suatu gerakan iklim yang digagas oleh dan diperuntukkan bagi kaum muda yang memiliki pengaruh besar bagi lanskap politik, dalam hal ini di United States, yaitu *Sunrise Movement*. Gerakan yang terbentuk pada 2017 tersebut dipicu oleh berbagai fenomena gerakan protes yang berlangsung secara masif mulai tahun 2015, seperti *Occupy Wall Street* dan *Black Lives Matter* yang merebak secara terdesentralisasi dan terorganisir di United States.

Para penggagas *Sunrise Movement* juga banyak terlibat di dalam gerakan divestasi bahan bakar fosil, yang kemudian mengarah pada keinginan untuk membentuk suatu gerakan protes terkait perubahan iklim. Keinginan tersebut diakomodir oleh sebuah institusi pelatihan dan inkubator gerakan di United States yang bernama Momentum.² Lawrence, *National Director of Strategic Partnerships and Co-Founder* dari *Sunrise Movement*, menyatakan bahwa pada dasarnya *Sunrise Movement* merupakan gerakan protes massa yang telah membangun elemen struktural untuk mengembangkan kapasitasnya (Lasoff, 2020, 21).

Berangkat dari tujuan untuk mengubah iklim politik yang ada, *Sunrise Movement* mendorong terwujudnya kebijakan nasional yang ambisius, yang disebut dengan *Green New Deal*.³ Gerakan protes massa yang diusung tersebut diejawantahkan ke dalam pengorganisasian yang berbasis pada struktur, seperti pembuatan *fellowship*

² Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui laman Momentum, institusi pelatihan dan inkubator gerakan tersebut menyediakan kerangka dan peralatan untuk membuat gerakan yang masif dan terdesentralisasi, yang dilakukan dengan mengkombinasikan dan memformulasikan *best practices* dari gerakan sosial terdahulu, teori gerakan kritis, dan keterampilan yang dapat diterapkan.

³ *Green New Deal* merupakan resolusi kongres guna memobilisasi setiap aspek kehidupan masyarakat Amerika menjadi 100% menerapkan energi terbarukan dan bersih, menjamin adanya pekerjaan dan upah yang layak bagi siapapun yang membutuhkannya, serta transisi yang adil baik bagi pekerja dan komunitas garis depan (*frontline community*) dalam 10 tahun ke depan.

program pada 2018 yang ditujukan untuk mengembangkan keanggotaan dan kepemimpinan gerakan. Secara umum, strategi yang diterapkan oleh *Sunrise Movement* didasarkan pada tiga prinsip, di antaranya yaitu *people power*, *political power*, dan *political alignment*. *People power* (kekuatan masyarakat) ditujukan untuk mencapai basis vokal yang luas dari dukungan aktif, yang dapat berupa donasi, penandatanganan petisi, berpartisipasi di dalam aksi, menyebarluaskan informasi melalui sosial media, dan lain sebagainya.

Sunrise Movement mengadaptasi prinsip tersebut dan merefleksikannya ke dalam sebuah sasaran spesifik untuk menyalurkan eksistensi gerakan dan mendapatkan dukungan dari sekitar 11 juta penduduk. Jumlah tersebut didasarkan pada sebuah studi yang dituliskan oleh Erica Chenoweth, seorang sarjana gerakan sosial, yang mencetuskan “3.5 percent rules”, di mana suatu gerakan sosial akan cenderung berhasil dan tidak dapat ditentang oleh pemerintah apabila sebanyak 3.5% populasi dapat dimobilisasi untuk mendukung gerakan tersebut. Target 11 juta populasi yang ditetapkan oleh *Sunrise Movement* kurang lebih setara dengan syarat kuantitas 3.5% populasi yang diperlukan untuk dapat melakukan perubahan revolusioner di United States. Sementara itu, *political power* (kekuatan politik) menggambarkan massa kritis yang merupakan pejabat publik yang bersedia untuk melakukan tindakan dan dukungan bagi gerakan.

Political Alignment (keselarasan politik) dapat diartikan sebagai pengelompokan kekuatan sosial, ekonomi, dan politik yang mampu mendefinisikan seperangkat agenda bersama bagi masyarakat (Lasoff, 2020, 20). Sementara itu, di dalam mengembangkan gerakannya, *Sunrise Movement* berpijak pada lima tahapan, di antaranya yaitu 1.) Mendirikan gerakan; 2.) Menjadikan perubahan iklim sebagai isu yang penting di dalam *midterm elections*; 3.) Menjadikan seluruh masyarakat di United States merasakan urgensi atas krisis yang terjadi; 4.) Memenangkan kekuasaan pemerintahan melalui pemilihan umum pada 2020; 5.) Terlibat dalam nonkooperasi masal untuk mengganggu berjalannya *business as usual* dan memenangkan *Green New*

Deal (Lasoff, 2020, 24). Kelima tahapan tersebut diharapkan dapat mencapai sasaran 3.5% populasi yang terlibat di dalam *Sunrise Movement*.

Gerakan-gerakan tersebut merefleksikan kesadaran masyarakat, khususnya dari kalangan pemuda bahwa kondisi perubahan iklim yang sedang terjadi saat ini akan memberikan efek domino yang luas kepada kehidupan di masa mendatang apabila tidak direspon secara tepat dan tegas, serta diselesaikan melalui solusi-solusi strategis yang dibutuhkan untuk mewujudkan ketahanan lingkungan dan menghentikan fenomena perubahan iklim. Sebagai respon atas isu perubahan iklim dan komitmen atas ratifikasi Paris Agreement, Indonesia menerapkan UU No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim). Selain itu, sebagai kewajiban atas komitmen yang tertuang di dalam *Paris Agreement*, Indonesia telah mengumpulkan *Nationally Determined Contribution* (NDC) untuk menyongsong agenda COP26 (*Conference of the Parties*) yang diselenggarakan pada 31 Oktober - 12 November 2021 lalu.

Di dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC) yang terbaru tersebut, Indonesia menetapkan sembilan strategi implementasi untuk mencapai target NDC pada tahun 2030, di antaranya yaitu:

1. Menciptakan komitmen dan rasa kepemilikan antara kementerian dan institusi pemerintahan lainnya, pemerintahan daerah, sektor privat, masyarakat sipil, dan institusi finansial (*stakeholders* partai dan non-partai).
2. *Capacity building* untuk meningkatkan kapasitas dari institusi dan sumber daya manusia pada berbagai level, yang mencakup seluruh aspek perubahan iklim, khususnya pada aksi adaptasi dan mitigasi, penerapan kerangka yang transparan, dan iklim keuangan.
3. Menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk melibatkan *stakeholders* secara lebih luas di dalam adaptasi dan mitigasi, sekaligus mobilisasi sumber

daya manusia melalui kerangka peraturan, kebijakan, dan pengukuran yang layak.

4. Mengembangkan jaringan dan kerangka koordinasi dan membangun sinergi di antara berbagai sektor, wilayah, dan aktor/*stakeholders*.
5. Terdapat satu kebijakan GHGs-data (data *Greenhouse Gasses*/gas rumah kaca) untuk mendukung penerapan dari kerangka transparansi pada level nasional.
6. Mengembangkan kebijakan, program perencanaan dan intervensi untuk penerapan NDC, termasuk pengintegrasian pencegahan pada lima kategori sektor (kehutanan, energi, IPPU, sampah, dan agrikultur) dan adaptasi (regio dan sektoral) ke dalam perencanaan pengembangan, untuk mengamankan dukungan finansial (pendanaan publik) dan memfasilitasi mobilisasi sumber daya (sumber domestik dan dukungan internasional).
7. Mengembangkan panduan atas penerapan NDC untuk memfasilitasi kementerian dan institusi pemerintahan lainnya, pemerintahan daerah, pemerintah dan *stakeholders* non-partai lainnya dalam mengimplementasikan program nomor 6.
8. Penerapan NDC mengacu pada implementasi kebijakan, program perencanaan dan intervensi (Program No. 6), dengan mempertimbangkan pengembangan panduan di bawah program nomor 7.
9. Pemantauan dan peninjauan atas NDC untuk melacak progres dari penerapan NDC, peninjauan NDC dan menyesuaikan NDC kapanpun dibutuhkan. Telah dibentuk tim antar kementerian untuk memantau progres dan pencapaian dari penerapan NDC.

Salah satu sektor utama yang ditargetkan di dalam pengimplementasian NDC (*Nationally Determined Contribution*) di Indonesia adalah sektor energi, yang pada saat ini penerapannya mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, dengan empat target utama, yaitu:

1. Penerapan energi baru dan terbarukan minimal 23% pada tahun 2025 dan minimal 31% pada tahun 2050.
2. Penggunaan minyak harus kurang dari 25% pada 2025 dan kurang dari 20% pada 2050.
3. Penggunaan batu bara harus kurang dari sama dengan 30% pada 2025 dan minimum 25% pada 2050; dan
4. Gas harus kurang dari sama dengan 22% pada 2025 dan minimum 24% pada 2050.

Target tersebut merupakan perwujudan dari kebijakan penggunaan energi campuran yang telah ditetapkan di Indonesia. Sebagai salah satu sektor yang memiliki dampak yang sangat signifikan pada berbagai kehidupan manusia, sektor energi memegang kendali utama sebagai prasyarat dari serangkaian pola aktivitas lainnya yang diperlukan untuk melangsungkan kehidupan. Berdasarkan urgensi tersebut, kebutuhan untuk menyoroti sektor energi, khususnya sebagai respon atas isu transisi energi demi mengatasi terjadinya perubahan iklim kemudian diakomodir oleh berbagai entitas gerakan yang ada di Indonesia, salah satunya oleh *Society of Renewable Energy* (SRE) yang didirikan pada 2019. Sebagai sebuah entitas yang mengakomodasi kepentingan lingkungan, *Society of Renewable Energy* (SRE) berangkat dari problem-problem empiris terkait akselerasi penggunaan energi terbarukan di Indonesia, guna mencapai target *net zero emission* Indonesia pada 2060.

Studi ini secara lebih lanjut akan menganalisis mengenai eksistensi *Society of Renewable Energy* (SRE) sebagai gerakan lingkungan yang mengakomodasi isu transisi energi untuk menanggulangi persoalan perubahan iklim di Indonesia. Sejak didirikan pada 2019, hingga saat ini *Society of Renewable Energy* (SRE) telah berkembang sedemikian masif, yang juga menjadikan organisasi ini dapat melakukan ekspansi yang luas di berbagai kampus yang ada di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat problem riset yang menarik untuk diteliti, khususnya mengenai bagaimana *Society of Renewable Energy* (SRE) sebagai organisasi gerakan sosial

(*social movement organization*) yang digagas oleh pemuda dan baru didirikan pada 2019 dapat mengeskalasi entitasnya melalui jaringan sumber daya yang luas dengan *stakeholders* gerakan, khususnya dengan pemerintah.

Penulis berupaya untuk mengidentifikasi upaya yang dilakukan oleh *Society of Renewable Energy* (SRE) untuk mendapatkan, mengelola, dan memobilisasi sumber daya, serta mendapatkan pola atas relasi yang dibangun dengan *stakeholders* gerakan di dalam proses transaksi sumber daya yang terjadi, khususnya di dalam membangun eksistensinya sebagai organisasi gerakan sosial lingkungan. Di dalam perspektif Ilmu Politik, menjadi penting untuk mengetahui dan mengidentifikasi eksistensi gerakan sosial yang mengakomodasi isu lingkungan beserta faktor-faktor determinan yang mendorong keberlanjutan gerakan serta pencapaian tujuan gerakan sosial.

Pada umumnya gerakan-gerakan sosial lingkungan diamati sebagai sebuah jaringan atau kelompok yang terbentuk sedemikian rupa yang melakukan suatu aksi kolektif untuk mencapai tujuan gerakan yang berpondasi pada isu lingkungan. Di dalam melakukan aktivitasnya, suatu gerakan memerlukan sumber daya yang dapat ditransformasikan sebagai bahan bakar di dalam mengaktualisasikan peranannya dan mencapai hasil yang diinginkan oleh gerakan. Transformasi sumber daya tersebut dilakukan melalui serangkaian strategi mobilisasi sumber daya, yang digunakan oleh gerakan sebagai basis untuk mengelola sumber daya yang dimiliki di dalam serangkaian aktivitas yang dilakukan. Jenis sumber daya dan strategi mobilisasi sumber daya menjadi sebuah pisau analisis yang penting untuk mengetahui proses operasional yang terjadi di dalam gerakan sosial, yang kemudian juga merefleksikan pendirian dan penguatan aksi yang dilakukan oleh gerakan, termasuk bagaimana gerakan sosial berinteraksi dengan berbagai stakeholder. Studi mengenai hal tersebut salah satunya dilakukan oleh Joko Suwarno (2016), yang meneliti mengenai gerakan sosial lingkungan yang dilakukan oleh GEMURUH (Gerakan Muncar Rumahku).

Sebagai sebuah entitas gerakan sosial lingkungan, GEMURUH berfokus pada sektor Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) di Kabupaten Banyuwangi, yang berawal dari problem mengenai menurunnya hasil tangkapan ikan karena proses

penangkapan yang eksploitatif oleh nelayan, yang juga menyebabkan sederet kerusakan ekosistem laut pada 2010. Di dalam mengaktualisasikan peranannya, GEMURUH menerapkan serangkaian strategi mobilisasi sumber daya, yang diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk sumber daya, di antaranya yaitu *moral resources*, *cultural resources*, *social-organizational resources*, *human resources*, dan *material resources*. Di dalam prosesnya, GEMURUH memiliki *moral resource* berupa legitimasi yang didapatkan dari sikap *hyper voluntary* yang dilakukan oleh para aktor GEMURUH.

Sementara itu, *cultural resource* yang dimiliki oleh GEMURUH direfleksikan melalui akomodasi kebudayaan dan tradisi masyarakat lokal, seperti dalam ritual *Petik Laut* yang dilaksanakan setiap tahun. *Social-organizational resource* diaktualisasikan oleh GEMURUH dengan melembagakan diri secara struktural ke dalam organisasi, yang juga mempermudah pembentukan jaringan sosial gerakan. Mobilisasi *human resources* dilakukan dengan mengembangkan kapasitas aktor-aktor gerakan di dalam menjalankan aktivitas dan program yang dilakukan. Sedangkan di dalam memobilisasi *material resources*, GEMURUH memanfaatkan berbagai aset yang dimiliki untuk mengaktualisasikan peranan gerakan, baik berupa modal finansial dan modal fisik (Suwarno, 2016).

Kajian mengenai mobilisasi sumber daya di dalam gerakan sosial tidak hanya terbatas pada bentuk gerakan sosial lingkungan, namun dapat diamati dalam skala lebih luas, salah satunya yang dilakukan oleh Luna Febriani (2017) yang menganalisis mengenai Gerakan Vespa Pustaka sebagai bentuk dari gerakan literasi. Di dalam analisisnya, Gerakan Vespa Pustaka yang diinisiasi oleh pemuda Toboali, bertolak dari beberapa permasalahan di antaranya yaitu karena tingkat literasi Indonesia yang masih rendah, khususnya yang terjadi di Kabupaten Bangka Selatan, serta keinginan untuk memberikan platform membaca kepada masyarakat daerah Toboali, Bangka Selatan. Strategi mobilisasi sumber daya yang dilakukan oleh Gerakan Vespa Pustaka tersebut diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis sumber daya, di antaranya sumber daya moral, kultural, organisasi sosial, sumber daya manusia, dan material.

Di dalam memobilisasi sumber daya moral, Gerakan Vespa Pustaka mendapatkan saluran melalui dukungan masyarakat luas dan para tokoh birokrasi. Berkaitan dengan sumber daya kultural, Gerakan Vespa Pustaka mengembangkan eksistensinya dengan mengumpulkan modal sosial, termasuk di antaranya kemampuan untuk berjejaring dan mengoperasikan teknologi informasi. Sumber daya organisasi sosial dioperasikan melalui berbagai jaringan yang telah dibangun dengan kelompok dan organisasi masyarakat lainnya. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh gerakan didapatkan melalui kapasitas anggota gerakan, khususnya mengenai status pendidikan yang sebagian besar merupakan mahasiswa strata 1 dan strata 2. Di samping itu, Gerakan Vespa Pustaka memobilisasi sumber daya material yang didapatkan dari dana pribadi ketua organisasi dan kas organisasi (Febriani, 2017).

Pada dasarnya, studi mengenai strategi mobilisasi sumber daya di dalam gerakan sosial menjadi sebuah titik tolak di dalam memahami bagaimana gerakan sosial dapat mengakomodasi kepentingannya secara luas dan menempatkan jaringan serta faktor eksternal sebagai salah satu fokus yang mendukung perkembangan gerakan. Hal tersebut juga membedakan kajian gerakan sosial kontemporer dalam perspektif mobilisasi sumber daya dengan studi mengenai gerakan-gerakan tradisional, yang menurut McCarthy dan Zald (1977) sering mengesampingkan dukungan faktor eksternal untuk mengkaji eksistensi gerakan sosial. Secara lebih lanjut, berkaitan dengan gerakan sosial lingkungan yang bertolak dari berbagai urgensi isu lingkungan, gerakan sosial perlu dipahami lebih dalam sebagai suatu wadah pengakomodasian kepentingan suatu kelompok dalam merespon fenomena yang terjadi terkait eksistensi lingkungan alam. Sehingga di dalam penelitian ini penulis ingin mendapatkan pola atas pengakomodasian kepentingan kelompok atas isu lingkungan tersebut, yang diaktualisasikan dalam konteks gerakan sosial lingkungan oleh *Society of Renewable Energy* (SRE).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan urgensi mengenai transisi energi yang semakin gencar diakomodir oleh berbagai pihak khususnya oleh gerakan-gerakan sosial di berbagai belahan dunia, dan menjadi salah satu isu sentral dalam dinamika ketahanan lingkungan saat ini, maka penelitian ini akan difokuskan untuk menganalisis pola relasi dan transaksi sumber daya yang mempengaruhi perkembangan organisasi gerakan sosial (*social movement organization*) di dalam akselerasi isu transisi energi, yang difokuskan untuk menjawab pertanyaan berikut:

1. Apa saja sumber daya yang dimiliki oleh *Society of Renewable Energy* (SRE) sehingga menjadi sebuah organisasi gerakan sosial (*social movement organization*) yang berkembang secara masif?
2. Bagaimana pola relasi dan transaksi sumber daya yang terjadi antara *Society of Renewable Energy* (SRE) dengan stakeholder gerakan—khususnya pemerintah, yang mendorong perkembangan gerakan?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.) Mengetahui apa saja sumber daya yang dimiliki oleh *Society of Renewable Energy* (SRE) sehingga dapat berkembang menjadi sebuah organisasi gerakan sosial (*social movement organization*) yang terinstitusionalisasi dan berkembang secara masif untuk mengakselerasi isu transisi energi di Indonesia.
- 2.) Menganalisis bagaimana pola relasi dan transaksi sumber daya yang terjadi di antara *Society of Renewable Energy* (SRE) dengan stakeholder gerakan, khususnya dengan pemerintah, yang mampu menjadikan gerakan pemuda tersebut berkembang begitu masif di dalam visi akselerasi transisi energi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

- 1.) Memberikan kontribusi dalam studi gerakan sosial-politik yang berkenaan dengan isu lingkungan.

- 2.) Memperluas perspektif tentang dinamika eksistensi gerakan sosial-politik isu lingkungan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1.) Menambah informasi bagi pihak yang memiliki ketertarikan akan kajian gerakan sosial-politik di Indonesia, khususnya mengenai isu transisi energi.
- 2.) Menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat topik mengenai gerakan sosial-politik isu lingkungan.

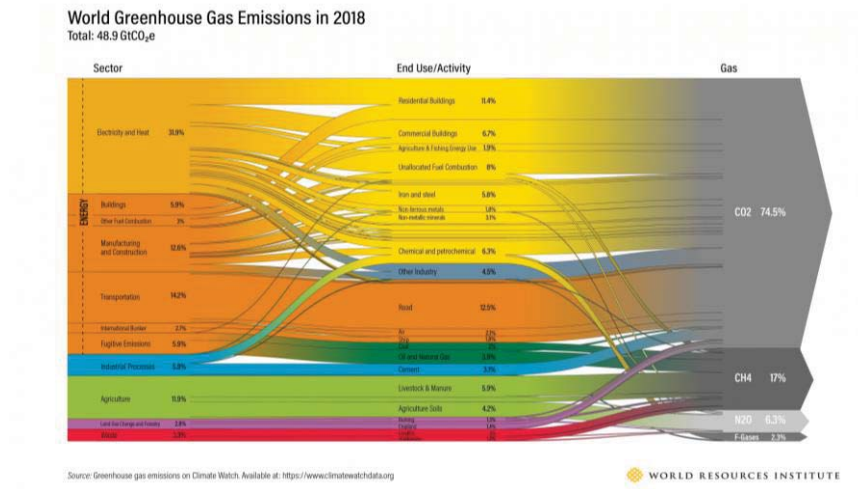
1.5 Kerangka Konseptual dan Teoritik

1.5.1 Konsep Transisi Energi

Perkembangan aktivitas manusia khususnya sejak era revolusi industri di abad kesembilan belas memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan, yang menyebabkan kenaikan emisi gas rumah kaca dan secara signifikan menyebabkan kenaikan temperatur global. Respon terhadap problem tersebut kemudian diakomodir melalui pakta global di dalam payung UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) melalui COP (*Conference of the Parties*) - khususnya pada COP 26 tahun 2021 lalu, untuk menindaklanjuti kesepakatan yang telah dituangkan di dalam *Paris Agreement*.

Berdasarkan riset yang dikemukakan oleh *World Resources Institute* (WRI) pada 2018, sektor energi merupakan penyumbang terbesar gas rumah kaca (CO₂) dengan persentase 74.5%, yang menyebabkan adanya urgensi untuk memfokuskan langkah strategis guna mengatasi problem kenaikan emisi CO₂ di sektor energi (*World Greenhouse Gas Emissions: 2018, 2021*). Peta persebaran emisi di tiap sektor tersebut dapat diamati pada bagan berikut.

Gambar 1.4 Bagan Gas Rumah Kaca dunia 2018



(Sumber: *World Resources Institute (WRI)*, 2021.)

Berkaitan dengan hal tersebut, maka berbagai respon yang diberikan untuk menekan jumlah dan dampak emisi di sektor energi pada dasarnya mengarah kepada langkah strategis untuk melakukan transisi energi. Secara sederhana, transisi energi dapat dipahami sebagai perubahan dari status quo sistem produksi dan konsumsi dunia yang didominasi oleh penggunaan bahan bakar fosil, ke arah sistem yang menghendaki dominasi atas penggunaan energi terbarukan.

Tujuan utama dari transisi energi adalah guna mengurangi emisi dari pembakaran fosil seperti minyak, gas, dan batubara dan juga dari berbagai rantai nilai yang memproduksinya (Henderson & Sen, 2021, 3). Selain itu, unsur lain yang terdapat di dalam tujuan dari transisi energi adalah untuk meningkatkan peluang yang tersedia untuk menambah tingkat efisiensi energi dan manajemen yang lebih baik akan permintaan energi (initiative.eu, 2015, 2). Komitmen negara-negara untuk mencapai net zero emission menjadi batu loncatan untuk dapat akselerasi transisi energi yang berkelanjutan di masa depan.

1.5.2 Teori Gerakan Sosial (*Social Movement Theory*)

Entitas gerakan sosial memiliki fokus dan bentuk yang berbeda dari bentuk-bentuk aksi kolektif lain seperti *riot*, *rebellion*, *crowd*, dan lain sebagainya. Jika ditilik melalui perspektif ilmu sosial, kemunculan gerakan sosial merupakan konsekuensi logis dari adanya konflik yang selalu muncul di tengah masyarakat. Gore (1989) menggarisbawahi hal tersebut, dengan menyebutkan potensi kemunculan gerakan sosial yang akan selalu ada dikarenakan keberadaan konflik yang selalu menjadi keniscayaan. Namun demikian, tidak berarti bahwa semua konflik akan selalu memicu timbulnya aksi kolektif, yang mana aksi kolektif juga akan membentuk sebuah gerakan sosial (Singh, 2010, 25).

Mario Diani menyatakan bahwa gerakan sosial adalah sebuah proses sosial yang berbeda, yang terdiri atas beberapa mekanisme melalui aktor-aktor yang terlibat di dalam aksi kolektif, di antaranya yaitu para aktor yang terlibat dalam hubungan konflikual dengan lawan yang dapat diidentifikasi secara jelas; para aktor terhubung dalam jaringan informal yang padat; dan berbagi identitas kolektif yang berbeda (Porta, 2006, 20). Berkaitan dengan aksi kolektif konflikual, para aktor yang terlibat di dalam konflik kultural dan/atau politik bermaksud untuk mempromosikan atau menentang terjadinya perubahan sosial. Kerangka konflik tersebut menunjukkan bahwa adanya hubungan yang berlawanan di antara para aktor yang mempertaruhkan hal yang sama, baik kekuasaan ekonomi, kultural, atau politik, yang mana di dalam prosesnya saling memberikan klaim negatif terhadap satu sama lainnya.

Sementara itu, jaringan informal yang padat menunjukkan bahwa proses gerakan sosial terjadi baik pada individu dan aktor-aktor yang terorganisir, yang sama-sama menjaga independensi dan otonomi yang dimilikinya, yang terikat di dalam pertukaran berkelanjutan atas sumber daya di dalam mengejar tujuan bersama. Berkaitan dengan identitas kolektif, Diani menyatakan bahwa gerakan sosial bukan semata-mata hanya sebagai gabungan dari agenda protes terkait isu tertentu atau kampanye spesifik. Sebaliknya gerakan sosial terjadi ketika terdapat pengembangan dari identitas kolektif.

Gerakan sosial memiliki definisi yang beragam, misalnya sebagaimana diajukan oleh McCarthy dan Zald (1977) yang menyatakan bahwa organisasi gerakan sosial (*social movement organization*) merupakan organisasi formal yang kompleks yang mengidentifikasi tujuannya dengan preferensi ke arah gerakan sosial atau gerakan perlawanan (*countermovement*) dan mencoba untuk mengimplementasikan tujuannya (Opp, 2009, 35). Sementara itu, Toch (1965) mendefinisikan gerakan sosial sebagai sejumlah besar orang yang secara kolektif berusaha memecahkan suatu permasalahan yang mereka rasakan bersama (Opp, 2009, 35). Gerakan sosial juga dapat didefinisikan oleh Tarrow (1998) sebagai tantangan kolektif yang berdasarkan pada tujuan bersama dan solidaritas sosial, dalam interaksi yang berkelanjutan dengan elite, lawan, dan otoritas (Opp, 2009, 35). Opp (2009, 36) mengemukakan salah satu komponen yang ada dalam definisi mengenai gerakan sosial, yang terefleksikan di dalam terminologi *antagonis*.

Hal tersebut menyiratkan bahwa partisipan atau anggota yang ada di dalam gerakan tidak semata-mata ingin mencapai tujuannya sendiri, namun lebih ke arah untuk mempengaruhi keputusan dari orang lain. Cameron (1967) mengajukan sebuah pandangan bahwa gerakan sosial terjadi ketika terdapat cukup banyak orang yang bersatu untuk mengubah atau menggantikan beberapa bagian dari tatanan sosial maupun kultural yang ada (Cameron, 1967, 7). Berkaitan dengan hal tersebut, Cameron mengakui bahwa definisi tersebut terlampau general dan ambigu, yang tidak memberikan parameter pasti terkait dengan komponen-komponen gerakan sosial di dalam proposisi yang telah dikemukakan.

1.5.3 Teori Gerakan Lingkungan (*Environmental Movement Theory*)

Gerakan lingkungan (*environmental movement*) dipertimbangkan sebagai salah satu kunci dari gerakan sosial baru (*new social movement*), yang juga diasumsikan memiliki karakteristik fundamental seperti gerakan sosial baru lainnya, misalnya gerakan keperempuanan, gerakan anti-nuklir, dan gerakan perdamaian (Mertig & Dunlap, 2001, 113). Gerakan lingkungan dianggap sebagai bentuk gerakan sosial baru

yang lebih berhasil selama pertengahan akhir abad kedua puluh (Mertig & Dunlap, 2001, 113). Di era industrialisasi yang semakin berkembang, gerakan lingkungan dianggap sebagai salah satu komponen krusial yang merefleksikan kepentingan umum. Mauss (1975) menyatakan bahwa kebanyakan gerakan sosial gagal untuk bertahan dalam jangka waktu beberapa tahun karena tidak dapat mencapai tujuan (Mertig & Dunlap, 2001, 114).

Kunci keberhasilan dari gerakan lingkungan yang merupakan bagian dari gerakan sosial baru adalah karena tujuan dari gerakan lingkungan pada umumnya mendapatkan dukungan luas dari publik (Hofrichter dan Reif, 1990 dalam Mertig & Dunlap, 2001, 114). Selain itu, gerakan lingkungan sangat diperhitungkan oleh khalayak umum karena memiliki dampak kultural dan institusional yang signifikan, baik pada negara industri maupun negara-negara lainnya (Buttel 1992, Dalton, 1994 dalam Mertig & Dunlap, 2001, 114).

Melalui pertumbuhan ekonomi dan kehidupan di berbagai sektor, entitas gerakan lingkungan mampu merepresentasikan ideologi yang signifikan terhadap status quo (Buechler, 1955; Buttel, 1997; Dalton, Kuechler, dan Burklin, 1990; Johnston, Larana, dan Gusfield, 1994; Klandermans, 1991; Kriesi et al. 1995; Pichardo, 1997; Scott, 1990 dalam Mertig & Dunlap, 2001, 114). Secara garis besar, gerakan lingkungan sering kali dianggap sebagai garda terdepan dari gerakan sosial baru, yang memiliki cakupan lebih dari isu lingkungan, namun juga memberikan payung bagi isu-isu lainnya yang termasuk di dalam gerakan sosial baru.

Sebagaimana dikemukakan oleh Hay (2002), Jamison (2001) berpendapat bahwa gerakan lingkungan mengalami momen kebangkitan sekitar tahun 1960-an, ketika tiga tradisi dimobilisasi guna memunculkan apa yang kemudian disebut sebagai gerakan sosial lingkungan baru (*new environmental social movement*) (Panescu, 2014, 181). Salah satu perbedaan yang cukup mencolok terkait eksistensi gerakan lingkungan di Barat adalah antara gerakan lingkungan di Amerika Serikat, yang sering disebut dengan *conservationism*, dan di Eropa Barat yang disebut dengan *environmentalism*. Pada umumnya, *conservationism* lebih menekankan pada keindahan alam dan

kelestarian satwa liar, sementara *environmentalism* berpendar pada paradigma proteksi lingkungan yang lebih luas dan berdiri sebagai *challenger* (penantang) untuk status quo, yang identik akan degradasi lingkungan karena berbagai aktivitas manusia yang semakin modern.

Di dalam memandang paradigma *environmentalism*, Hay (2002) menyatakan bahwa *environmentalism* memiliki dua komponen, yaitu mengenai pandangan ‘intelektual’ dan ‘aktivisme. Dalam hal ini, baik *environmentalism* maupun gerakan lingkungan (*environmental movement*) mengandung baik teori (ideologi hijau/*green ideology*, pemikiran lingkungan/*environmental thought*, *eco-philosophy*) maupun bentuk-bentuk mobilisasi dan organisasi (organisasi dan kelompok lingkungan) (Panescu, 2014, 29). Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan karena pemikiran lingkungan (teori) dapat menghasilkan sebuah gerakan di dalam organisasi atau kelompok protes, dan sebaliknya, organisasi lingkungan dapat memproduksi sebuah ideologi, pemikiran, dan ide-ide baru (Panescu, 2014, 29).

Gerakan lingkungan dipandang sebagai suatu entitas yang dinamis dan dapat terus berubah sepanjang waktu. Sebagai bagian dari gerakan sosial baru yang memiliki beragam sudut pandang kajian, mulai dari deprivasi relatif (*relative deprivation*), mobilisasi sumber daya (*resources mobilization*, hingga pendekatan politik (*political approach*), gerakan lingkungan juga dikaji dengan cara terfragmentasi, namun tidak jarang studi tersebut mengkombinasikan dua atau lebih perspektif mengenai *environmentalism*. Beberapa studi terkait *environmentalism* antara lain disampaikan oleh Donald Worster (1977), John Rodman (1983), Warwick Fox (1990), dan Andrew Jamison (1990 dan 2001).

Studi-studi tersebut menggambarkan berbagai variasi dan taksonomi mengenai *environmentalism*, sebagaimana yang terdapat di dalam teori-teori gerakan sosial. Rodman (1983) mengklasifikasikan empat kategori dari *environmental thought*, di antaranya yaitu yang disebut sebagai *Resource Conservation* (konservasi sumber daya), yang menitikberatkan pada penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab. Kategori lainnya disebut *Moral Extensionism*, yang menjelaskan bahwa manusia

memiliki kewajiban secara langsung terhadap entitas makhluk hidup lain. *Ecological Sensibility* merupakan kategori selanjutnya yang terdiri atas tiga komponen yang berupa sebuah set kompleks dari nilai, persepsi, sikap, dan keputusan.

Komponen pertama adalah sebuah teori yang mengakui nilai intrinsik alamiah, yang kedua berupa metafisika yang mempertimbangkan pentingnya sistem dan individu, dan yang ketiga menekankan pada etika bahwa, ‘terdapat kewajiban mengenai prinsip non interferensi terhadap proses alam’, termasuk kebijakan yang mengatur tentang pelanggaran terhadap prinsip non interferensi tersebut (Rodman, 1983 dalam Panescu, 2014, 31). Jika merujuk pada berbagai literatur mengenai gerakan lingkungan (*environmental movement*), maka dapat diamati dengan jelas bahwa sebagai suatu gerakan yang spesifik, *environmentalism* seringkali dianalisis melalui salah satu perspektif umum yang ada di dalam teori-teori gerakan sosial (Panescu, 2014, 33).

Rootes (1999), mendefinisikan gerakan sosial lingkungan (*environmental social movement*) sebagai sebuah jaringan longgar yang terdiri atas organisasi dan orang-orang yang ikut serta di dalam aksi kolektif dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat lingkungan, di mana organisasi tersebut beragam, mulai dari bentuk yang sangat informal hingga yang sangat terorganisir bahkan terinstitusionalisasi. Cakupan spasial dari gerakan tersebut juga bervariasi, baik dalam lingkup lokal maupun global, dan baik dengan satu isu sampai dengan kumpulan lengkap yang menjadi perhatian lingkungan global (Panescu, 2014, 34).

Luhmann (1989) menggagas sebuah pemikiran dan teori gerakan lingkungan, yang berangkat dari teori sistem, yang merupakan kritik dari berbagai teori gerakan sosial yang dianggap cenderung terpisah-pisah dan tidak padu di dalam menjawab dan menelaah fenomena gerakan sosial. Kemunculan gerakan lingkungan diawali dengan penemuan topik yang diangkat di dalam gerakan, yang dalam hal ini tidak ditemukan di dalam sistem masyarakat, namun di dalam sistem lingkungan. Meskipun pada dasarnya gerakan lingkungan terlihat telah ‘menemukan topiknya’ yang berpondasi pada isu-isu lingkungan, namun berdasarkan tesis yang dikemukakan Luhmann di

dalam teori umum sistem (*the system general theory*), untuk menjadikan suatu tema menjadi topik suatu gerakan protes, maka topik tersebut perlu dihubungkan dengan kontradiksi.

Masyarakat dianggap sebagai sebuah sistem komunikasi, sehingga kontradiksi tersebut hanya dapat ditemukan di dalam masyarakat, dalam hal sebuah bentuk komunikasi. Hay (2002) menegaskan bahwa pemikiran *environmental* menggarisbawahi kontradiksi tersebut dan mulai menaruh perhatian pada hal tersebut pada akhir abad kedelapan belas, dengan kemunculan romantisme. Usai menemukan topik yang akan diangkat di dalam gerakan protes, maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah menyatukan bentuk-bentuk dan topik tersebut di dalam sebuah gerakan (Panescu, 2014, 172).

Untuk menjelaskan kelahiran kembali dari *environmentalism* dan pencapaian di dalam ruang lingkup gerakan sosial baru yang lebih luas, Rootes (2004) berangkat dari suatu fakta bahwa dampak industrialisasi saat ini menjadi semakin nyata, yang dapat diamati bukan hanya dari terjadinya bencana seperti krisis nuklir di Idaho pada 1961, bencana Waduk Vajont di dekat Venezuela pada 1963, atau tumpahan minyak Santa Barbara pada 1969, tetapi juga degradasi lingkungan secara umum, seperti polusi udara yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat. Selain itu, pemahaman ilmiah yang lebih baik terkait dampak dari teknologi dan industrialisasi terhadap lingkungan ditambah dengan meningkatnya edukasi dari seluruh populasi, akan turut meningkatkan kesadaran lingkungan (Panescu, 2014, 182).

Perluasan dari gerakan tersebut juga didukung oleh pertumbuhan media massa yang menyebarkan informasi secara lebih cepat dan mudah. Semua faktor tersebut akan mengarah kepada pembentukan pandangan kritis terhadap doktrin sosio-ekonomi dominan dan pertanyaan terkait ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, dan pembuatan kebijakan. Pemikiran lingkungan (*environmental thoughts*) bukanlah sebuah teori yang terintegrasi karena menggabungkan hubungan terkait perbedaan pandangan antara *human-environment* dan *society-environment*. Meskipun demikian, teori gerakan lingkungan melihat bahwa masyarakat dan lingkungan tersebut saling

berhubungan dan seluruhnya menyatukan masyarakat, sikap, dan tindakan yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan.

1.5.4 Teori Mobilisasi Sumber Daya (*Resources Mobilization Theory*)

Teori mobilisasi sumber daya (*resources mobilization theory*) merupakan salah satu teori major dalam analisa gerakan sosial yang dikembangkan oleh McCarthy dan Zald (1977), yang dituangkan melalui karya bertajuk “*Resources Mobilization Theory and Social Movements: A Partial Theory*”. Dalam hal ini, *resource mobilization perspective* (RMP) dianggap sebagai sebuah teori yang parsial karena teori tersebut dapat berlaku atau dijustifikasi pada konteks dan kondisi tertentu, yang secara khusus didapatkan melalui analisis atas kasus-kasus gerakan “kiri” di Amerika. Oleh karena itu, dampak perbedaan dari perkembangan struktur sosial dan politik di berbagai tempat belum dieksplorasi dan diakomodir secara menyeluruh melalui RMP. Secara garis besar, *resource mobilization perspective* (RMP) menekankan pada dukungan sosial dan penghalang dari fenomena gerakan sosial.

Resource mobilization perspective (RMP) menolak gagasan deprivasi sebagai pusat utama yang memicu gerakan sosial, dan lebih menitikberatkan pada teori ekonomi, sosiologi, dan politik dibandingkan dengan psikologi sosial atas perilaku kolektif. McCarthy and Zald (1977) menganggap bahwa keluhan dan ketidakpuasan yang menjadi arus utama dari konsepsi gerakan sosial justru dapat didefinisikan, diciptakan, dan dimanipulasi oleh pencipta isu dan organisasi (McCarthy & Zald, 1977, 1215).

Berkaitan dengan hal tersebut, perspektif yang ditawarkan oleh teori mobilisasi sumber daya (*resources mobilization theory*) menyatakan bahwa gerakan sosial kemungkinan dapat berlandaskan pada keluhan atau ketidakpuasan atas manfaat yang diharapkan, namun hal tersebut tidak selalu menjadi prasyarat dari keberadaan gerakan sosial. Di samping itu, berkaitan dengan strategi dan taktik, teori mobilisasi sumber daya (*resources mobilization theory*) memiliki sejumlah tugas strategis, seperti memobilisasi dukungan, menetralkan dan mentransformasi massa dan elite publik

menjadi simpatisan gerakan, dan mencapai perubahan di dalam target. Hal tersebut berbeda dengan pola pada gerakan tradisional di mana pemimpin gerakan cenderung menggunakan penawaran, persuasi, dan kekerasan untuk mempengaruhi perubahan otoritas.

Berkaitan dengan hubungannya kepada masyarakat luas, teori mobilisasi sumber daya (*resources mobilization theory*) memanfaatkan infrastruktur yang disediakan oleh masyarakat yang dapat digunakan oleh *social movement industry* (SMI) dan berbagai industri-industri lainnya. Di dalam analisis *resource mobilization perspective* (RMP), terdapat beberapa terminologi yang dikemukakan oleh McCarthy dan Zald untuk memberikan kerangka konseptual yang lebih terstruktur. Gerakan sosial didefinisikan sebagai seperangkat opini dan kepercayaan di dalam populasi yang merepresentasikan preferensi untuk perubahan beberapa elemen atas struktur sosial dan/atau distribusi penghargaan masyarakat. Di sisi yang berseberangan, terdapat *countermovement* yang merupakan seperangkat opini dan kepercayaan di dalam populasi yang berlawanan dengan gerakan sosial.

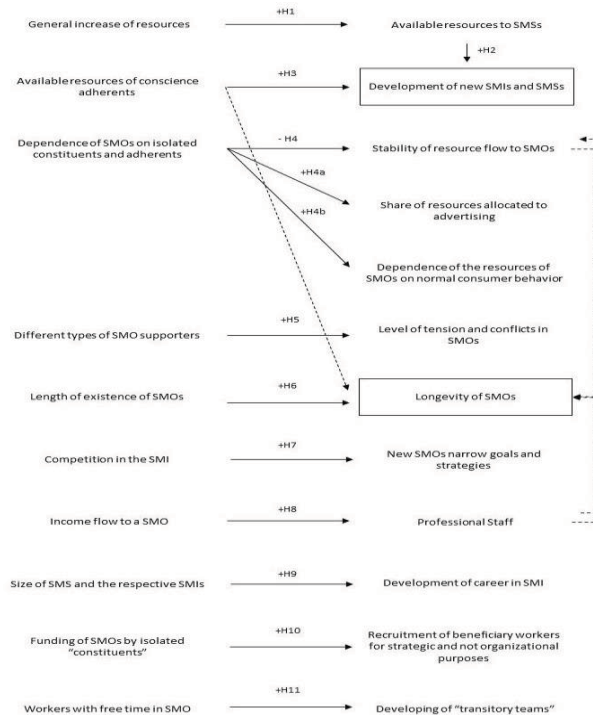
Resource mobilization perspective (RMP) berfokus pada analisis mengenai organisasi yang sudah terbentuk dan integrasi dari segmen populasi yang berbagi preferensi. Dengan menganalisis struktur organisasi gerakan, McCarthy dan Zald (1977) mengajukan strata atas bentuk gerakan sosial dan terbagi atas *social movement sectors* (SMS), *social movement industry* (SMI), dan *social movement organization* (SMO). Strata paling dasar diduduki oleh *social movement organization* (SMO) yang diartikan sebagai sebuah organisasi yang formal atau kompleks, yang mengidentifikasi tujuannya dengan preferensi sebagai gerakan sosial (*social movement*) atau gerakan perlawanan (*countermovement*) dan mencoba untuk mengimplementasikan tujuan-tujuan tersebut.

Seluruh *social movement organization* (SMO) yang memiliki tujuan untuk mencapai preferensi terluas atas gerakan sosial disebut sebagai *social movement industry* (SMI). Sementara itu, terminologi sentral gerakan sosial (*social movement*) secara khusus meliputi elemen atas preferensi dan aksi yang terorganisir untuk

perubahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara definisi dari gerakan sosial (*social movement*) dan *social movement industry* (SMI), di antaranya bahwa gerakan sosial (*social movement*) tidak selalu dimobilisasi sepenuhnya, secara eksplisit berfokus pada aktivitas dari komponen organisasi, dan secara eksplisit mengenali bahwa gerakan sosial (*social movement*) secara khusus direpresentasikan oleh lebih dari satu SMO. Strata teratas dari terminologi gerakan sosial yang dicetuskan oleh McCarthy dan Zald adalah *social movement sector* (SMS), yang terdiri atas berbagai SMI di dalam masyarakat, apapun jenis gerakan sosial (*social movement*) yang mengikatnya.

Secara kasar, jumlah dari aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan merupakan fungsi dari pengelolaan sumber daya yang dilakukan oleh organisasi. Dalam banyak kasus, sumber daya harus dikelola atau dimobilisasi sebelum terjadinya aksi. McCarthy dan Zald juga memberikan kategori dimensi atas subjek-subjek yang berkaitan dengan gerakan sosial, di antaranya yaitu *adherent* (pengikut) yang diartikan sebagai individu dan organisasi yang mempercayai tujuan dari organisasi. Sementara itu, konstituen adalah mereka yang secara langsung menyediakan sumber daya bagi organisasi (waktu, uang, dan lain sebagainya). Ralph Turner (1970) menggunakan istilah pengamat publik (*bystander public*) yang mengacu kepada *non adherents* (bukan pengikut) yang bukan menjadi lawan dari gerakan sosial (*social movement*) dan *social movement organizations* (SMOs) - yang hanya menjadi saksi dari aktivitas gerakan sosial.

Sementara itu, mereka yang akan secara langsung mendapatkan manfaat atas keberhasilan tujuan gerakan disebut sebagai *potential beneficiaries*. *Conscience adherents* adalah individu atau kelompok yang menjadi bagian dari *social movement* (SM) namun tidak mendapatkan keuntungan secara langsung dari keberhasilan pencapaian tujuan gerakan. *Conscience constituents* merupakan pendukung langsung dari SMO yang tidak secara langsung mendapatkan keuntungan dari keberhasilan pencapaian tujuan gerakan. Di dalam analisisnya, McCarthy dan Zald mencetuskan sebelas hipotesis yang membentuk sebuah model kausal, seperti skema berikut.

Gambar 1.5 *The causal structure of McCarthy and Zald hypotheses*(Sumber: Moor et al., 2020, 12)

Secara garis besar, kesebelas hipotesis tersebut menggambarkan interaksi di antara ketersediaan sumber daya, struktur preferensi organisasi yang telah ada, dan usaha untuk mencapai preferensi permintaan. McCarthy dan Zald menegaskan bahwa perbedaan kondisi historis dan pola *adherents* (pengikut) atas infrastruktur organisasi yang telah terbentuk akan mempengaruhi strategi dari aktivitas SMO di waktu dan tempat yang lain.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Fokus Penelitian

Penelitian dengan judul, “Akselerasi Isu Transisi Energi oleh *Society of Renewable Energy* (SRE) Indonesia. Suatu Tinjauan *Social Movement Organization*” ini akan difokuskan untuk menganalisis eksistensi *Society of Renewable Energy* (SRE) Indonesia sebagai sebuah bentuk organisasi gerakan sosial (*social movement*

organization) serta pendayagunaan berbagai sumber daya dan pola relasi yang dimiliki oleh gerakan sehingga organisasi gerakan sosial (*social movement organization*) yang baru didirikan pada 2019 tersebut dapat berkembang secara masif, terutama melalui peran pemerintah sebagai *stakeholders* yang mempengaruhi eksistensi gerakan secara signifikan.

Sebagai sebuah entitas organisasi gerakan sosial, nantinya akan dianalisis bagaimana latar belakang kemunculan *Society of Renewable Energy* (SRE) dan proses mobilisasi atas berbagai peluang dan sumber daya yang digunakan untuk membentuk sebuah organisasi strategis, yang secara langsung dapat mendistribusikan kepentingannya ke dalam aspek politik akselerasi isu transisi energi melalui relasinya dengan pemerintah. Penelitian ini diharapkan akan memberikan sebuah gambaran mengenai proses pengakomodasian kepentingan lingkungan, dalam hal ini berkaitan dengan isu transisi energi, dan bagaimana ideologi serta kepentingan tersebut dilembagakan dalam suatu bentuk organisasi yang kemudian memiliki relasi dan pengaruh dalam upaya akselerasi isu transisi energi.

1.6.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang disertai dengan tinjauan literatur. Penelitian kualitatif deskriptif diorientasikan untuk memaparkan fakta, gejala, dan fenomena yang terjadi secara tepat dan sistematis, berkaitan dengan ciri dan sifat yang melekat pada suatu wilayah dan populasi tertentu. Patton (1980) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai upaya yang dilakukan untuk memahami kondisi dalam keunikan fenomena sebagai bagian atas konteks tertentu dan interaksi yang terjadi di dalam fenomena tersebut. Dengan demikian, analisis yang dikembangkan di dalam penelitian kualitatif akan cenderung mengarah kepada bentuk-bentuk deskriptif daripada prediktif (Aminah & Roikan, 2019, 55).

Pendekatan kualitatif deskriptif akan digunakan untuk menangkap realitas fenomena atas keberadaan organisasi *Society of Renewable Energy* (SRE), guna

mengetahui dan menggali makna di balik perilaku aktor-aktor yang terlibat di dalam organisasi gerakan sosial yang diakomodasi oleh *Society of Renewable Energy* (SRE) Indonesia, terhadap upayanya untuk mengakselerasi isu transisi energi di Indonesia.

Fenomena gerakan sosial ini cukup unik untuk diteliti karena kemunculannya memberikan tantangan bagi status quo dominasi penggunaan energi fosil sebagai pasokan utama energi di Indonesia, dan sasaran gerakan yang menitikberatkan pada segmen pemuda sebagai agitator gerakan yang mengusung isu lingkungan, khususnya transisi energi. Di samping itu, terdapat problem penelitian yang menarik untuk dikaji di mana keberadaan gerakan pemuda yang mengusung isu lingkungan, yang notabene cenderung populis, dapat berkembang sedemikian masif hanya dalam kurun waktu sekitar 3 tahun sejak didirikan, dan justru mendapatkan momen transaksi sumber daya yang signifikan dengan pemerintah.

Fenomena tersebut menjadi menarik untuk diteliti mengingat posisi organisasi gerakan sosial (*social movement organization*) yang mengklaim diri sebagai sebuah gerakan independen, justru memiliki intensitas relasi yang kuat dengan berbagai *stakeholders* gerakan, khususnya dengan pemerintah, yang mampu mendorong perkembangan gerakan dengan sedemikian masif. Sementara itu, tinjauan literatur akan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data tertulis baik yang didokumentasikan maupun tidak, yang dapat memberikan validasi serta melengkapi data yang telah diperoleh melalui wawancara.

Segmen khusus yang dipilih oleh gerakan yang memobilisasi dukungan dari pemuda secara luas di berbagai wilayah yang ada di Indonesia, menunjukkan corak gerakan yang ingin mendayagunakan pemuda sebagai sumber daya manusia sekaligus identitas gerakan, yang memiliki potensi tinggi dan belum dimanfaatkan pada isu partikular mengenai kesadaran dan aksi terkait isu transisi energi secara masif di Indonesia. Di samping itu, pendekatan kualitatif deskriptif juga akan digunakan untuk menganalisis fenomena yang terjadi di dalam konteks pola relasi dan transaksi sumber daya yang mempengaruhi kemunculan dan perkembangan organisasi gerakan sosial (*social movement organization*) *Society of Renewable Energy* (SRE).

1.6.3 Lokasi Penelitian

Peneliti akan berfokus untuk menganalisis organisasi gerakan sosial (*social movement organization*) *Society of Renewable Energy* (SRE) Indonesia, yang secara resmi berbentuk Yayasan Indonesia Muda Berbagi Energi, yang merupakan organisasi pusat yang bertindak sebagai payung dari organisasi cabang (*student chapters*) tingkat universitas di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. *Society of Renewable Energy* (SRE) Indonesia tidak memiliki sebuah kantor pusat, dan anggotanya tersebar di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Peneliti tidak menasar lokasi regional tertentu untuk melaksanakan penelitian, melainkan menganalisis eksistensi dan aktivitas *Society of Renewable Energy* (SRE) Indonesia sebagai organisasi pusat yang memiliki cakupan pengaruh politik, intensitas, dan interaksi yang lebih kuat dengan para *stakeholders* gerakan, khususnya dengan pemerintah, sebagai motor utama yang mampu mengeskalasi eksistensi organisasi federal (*student chapters*) di berbagai universitas yang ada di Indonesia.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian tentang organisasi gerakan sosial (*social movement organization*) ini akan dilakukan dengan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pihak-pihak yang terlibat di dalam gerakan, serta data sekunder yang diperoleh melalui tinjauan literatur. Di dalam wawancara, penentuan informan akan ditentukan menggunakan teknik *purposive*, di mana peneliti akan terlebih dahulu menentukan informan yang akan dipilih sebagai narasumber untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan relevan di dalam penelitian. Data yang ditargetkan akan diperoleh melalui sumber data primer dan sekunder.

Data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam (*in depth interview*) akan dilakukan dengan menanyakan berbagai pertanyaan general mengenai topik penelitian, yang selanjutnya akan diperdalam ke dalam pertanyaan-pertanyaan spesifik untuk menggali perspektif informan terhadap fenomena dan rumusan masalah yang sedang diteliti. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui berbagai data literatur

yang ditujukan untuk memberikan validasi atas suatu fenomena melalui berbagai sumber tulisan, seperti jurnal, buku, dokumen, dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data ini dipilih agar peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih holistik mengenai berbagai aspek yang berpengaruh terhadap fenomena yang sedang dikaji, termasuk menjangkau informasi yang lebih relevan untuk menjawab rumusan masalah yang difokuskan di dalam penelitian ini.

1.6.4.1 Data Primer

Data ini berasal langsung dari informan yang menjadi relasi peneliti di dalam mengidentifikasi SRE sebagai organisasi gerakan sosial (*social movement organization*). Data primer pada penelitian ini akan didapatkan melalui beberapa informan yang telah ditentukan, yaitu Rauf Usman (*Chairperson of SRE*), Reiner Nathaniel (*Vice Chairperson of SRE*), Ilham Nugraha (*Director of Think Tank SRE*), Alif Alauddin (*Lead Fellow Researcher of Think Tank SRE*), Naufal Az (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM).

Tabel 1.1 Daftar Narasumber dan Target Data Penelitian

No.	Jabatan/Instansi	Target Data
1.	Rauf Usman/ <i>Chairperson of SRE</i> Indonesia	Mengetahui bentuk kerja sama dan pola relasi yang dilakukan oleh SRE dengan <i>stakeholders</i> gerakan; sejarah terbentuknya gerakan; sumber daya yang didapatkan oleh gerakan dan strategi mobilisasi sumber daya; mekanisme pengelolaan sumber daya gerakan; pengelolaan organisasi dan aksi kolektif di dalam gerakan; keterlibatan SRE di dalam berbagai forum strategis mengenai transisi energi (G20); proses pengaktualisasian

		program-program gerakan dan relasi yang terbentuk dengan <i>stakeholders</i> gerakan (pemerintah, dll.) di dalam program tersebut.
2.	Reiner Nathaniel/ <i>Vice Chairperson of SRE Indonesia</i>	Mengetahui bentuk kerja sama dan pola relasi yang dilakukan oleh SRE dengan <i>stakeholders</i> gerakan; sejarah terbentuknya gerakan; sumber daya yang didapatkan oleh gerakan dan strategi mobilisasi sumber daya; mekanisme pengelolaan sumber daya gerakan; pengelolaan organisasi dan aksi kolektif di dalam gerakan; keterlibatan SRE di dalam berbagai forum strategis mengenai transisi energi (G20); proses pengaktualisasian program-program gerakan dan relasi yang terbentuk dengan <i>stakeholders</i> gerakan (pemerintah, dll.) di dalam program tersebut.
3.	Ilham Nugraha/ <i>Director of Think Tank SRE Indonesia, Tim peneliti junior G20 Energy Transition Working Group (ETWG).</i>	Mengetahui proses terbentuknya platform Think Tank; tuntutan dan rekomendasi yang diberikan oleh Think Tank kepada pemerintah; pola relasi yang terbangun antara Think Tank dengan pemerintah di dalam <i>Energy Transition Working Group (ETWG)</i> Presidensi G20 yang dinaungi oleh KESDM; sumber daya yang diberikan dan diterima oleh Think Tank di dalam mengakomodasi isu dan kepentingan transisi energi yang diusung oleh <i>Society of Renewable Energy (SRE)</i> .

4.	Alif Alauddin/ <i>Lead Fellow Researcher of Think Tank SRE</i> , Tim peneliti junior <i>G20 Energy Transition Working Group</i> (ETWG).	Mengetahui proses terbentuknya platform Think Tank; tuntutan dan rekomendasi yang diberikan oleh Think Tank kepada pemerintah; pola relasi yang terbangun antara Think Tank dengan pemerintah di dalam <i>Energy Transition Working Group</i> (ETWG) Presidensi G20 yang dinaungi oleh KESDM; sumber daya yang diberikan dan diterima oleh Think Tank di dalam mengakomodasi isu dan kepentingan transisi energi yang diusung oleh <i>Society of Renewable Energy</i> (SRE).
5.	Naufal Az/Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM)	Mengetahui apa saja tuntutan dan rekomendasi yang diberikan oleh SRE dan respon dari KESDM; bentuk kerja sama dan pola relasi yang terjalin di antara SRE dan KESDM; sumber daya yang diberikan oleh KESDM kepada SRE; Mengetahui posisi dan pengaruh SRE berkaitan dengan isu transisi energi di Indonesia; kepentingan KESDM terhadap SRE; Keterlibatan SRE di dalam berbagai proyek kerja sama khususnya di dalam forum-forum strategis (<i>Energy Transition Working Group</i>); <i>empirical gap</i> yang berusaha diatasi oleh KESDM melalui eksistensi SRE.

1.6.4.2 Data Sekunder

Data sekunder di dalam penelitian didapatkan melalui proses kajian literatur (*literature review*) melalui berbagai sumber, seperti dokumen, arsip, jurnal, catatan, dan lain sebagainya, baik yang telah dipublikasikan maupun tidak, yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

1.6.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data di dalam studi ini akan dimulai dengan mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian, untuk memberikan gambaran dasar bagi peneliti di dalam mengumpulkan dan menganalisis data penelitian. Pengumpulan data diawali dengan melakukan wawancara mendalam terhadap pihak-pihak yang telah ditargetkan oleh peneliti. Peneliti juga mengumpulkan berbagai data sekunder yang relevan dan dibutuhkan selama proses pengumpulan data.

Peneliti akan memulai wawancara kepada *chairperson* dan *vice chairperson* dari *Society of Renewable Energy* (SRE) untuk mengetahui detail mengenai pola operasional organisasi dan proses pembentukan serta transisi organisasi ke dalam Yayasan Indonesia Muda Berbagi Energi (IMBE). Selain itu, akan digali pula pola relasional dan strategi organisasi di dalam memperoleh berbagai sumber daya dari *stakeholders* gerakan, dan aksi serta kontribusi yang dilakukan untuk mengakselerasi visi transisi energi.

Untuk mengetahui lebih detail mengenai keterlibatan *Society of Renewable Energy* (SRE) di dalam *Energy Transition Working Group* (ETWG) dan tuntutan serta rekomendasi spesifik yang diakomodasi oleh organisasi kepada pemerintah, selanjutnya peneliti akan melakukan wawancara kepada pihak Think Tank *Society of Renewable Energy* (SRE), yang terlibat secara langsung di dalam proses tersebut. Sehingga akan diketahui secara lebih spesifik gambaran mengenai pola relasional antara gerakan *Society of Renewable Energy* (SRE) dan pemerintah.

Guna mengkonfirmasi data dan memperoleh sudut pandang yang lebih holistik di dalam relasi gerakan *Society of Renewable Energy* (SRE) dan pemerintah,

selanjutnya peneliti akan mewawancarai pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), khususnya guna menggali kepentingan pemerintah terhadap gerakan dan bagaimana proses transaksi sumber daya yang terjadi untuk menyokong keberlanjutan gerakan *Society of Renewable Energy* (SRE). Di dalam proses analisis data, peneliti juga akan meminta beberapa data sekunder yang relevan dari narasumber untuk digunakan sebagai acuan di dalam memetakan dan menganalisis fenomena yang terjadi, utamanya di dalam menjawab rumusan masalah dan problem riset di dalam penelitian. Di samping itu, peneliti akan memasukkan beberapa fenomena yang terjadi di sekitar peneliti, yang berkaitan dengan objek penelitian, yang dapat dianalisis sebagai dasar penarikan kesimpulan.